

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA PERKREDITAN
DESA DALAM MEMBEANKAN HAK TANGGUNGAN PADA HAK
ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN**

Oleh:

**I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra, NIM 1714101059
Program Studi Ilmu Hukum**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa peran dan tanggung jawab LPD terhadap hak tanggungan atas tanah (2) mengetahui dan mengkaji kepastian hukum mengenai lembaga perkreditan desa dalam membebankan hak tanggungan hak atas tanah ditinjau dari undang-undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sumber bahan hukum yang digunakan yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang Hak Tanggungan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran LPD untuk menunjang lajunya perekonomian pelaksanaan lembaga keuangan pedesaan, serta tanggung jawab LPD mengelola keuangan Desa Pakraman (2) kepastian hukum Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah mempertimbangkan bahwa perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Kata Kunci : LPD, Hak Tanggungan, Kepastian Hukum.

**THE JURIDICAL REVIEW OF THE FEDERAL AUTHORITY OF THE
COMMUNITY OF FINANCE WAS IMPOSED ON THE RIGHTS OF THE
LAND ACCORDING TO THE 1996 ACT NO. 4 ON THE RIGHTS OF
LIABILITY**

By:

I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra, NIM 1714101059

Law Departement

ABSTRACT

The study aims to (1) to discover and analyze the role and responsibility of the LPD on land rights (2) to know and review the legal certainty regarding the village credit society in imposing land liabilities in the form of land title number 4 in 1996. The type of study used is normative-law research, normative-law research, which is done by examining applicable or applied legislation on a particular legal matter. Used legal sources obtained and processed in normative law research are secondary data obtained from literature sources consisting of primary law sources, secondary law sources, and tertiary or tertiary material. Legal collection techniques are done by excavating the normative framework and document study techniques using legal materials that discuss the rights to land rights. The results of the study show that (1) the role of the LPD is to support the economic speed of the implementation of rural financial institutions, as well as the responsibility of the LPD to manage the finances of the Pakraman Village (2) the legal certainty of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land taking into account that developments that have occurred and will occur in the field of regulation and administration of rights to land. land and to meet the needs of many people.

Keywords: LPD, Liability, legal certainty.